

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Raya Paliyan 77 Tahunan, Paliyan, Gunungkidul Yogyakarta Kode Pos 55871
Telepon • 085101489269

Posel paliyan@gunungkidulkab.go.id; Laman paliyan.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Paliyan, 31 Januari 2026



TALVIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M

NIP. 197208012005011008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Paliyan tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Capaian Tujuan

1. Tujuan 1 “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas”

Dengan target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2025 sebesar 96,15 dan capaian Tahun 2025 sebesar 94,98 maka tujuan tercapai sebesar 98,78%

2. Tujuan 2 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

Dengan Target Jumlah Potensi Budaya lokal yang di lestarikan sebesar 6 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sebesar 6 potensi budaya maka tujuan sudah tercapai 100%.

B. Capaian Sasaran

1. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon Meningkatkan”.

- a. Pengukuran kinerja Kapanewon dilakukan melalui instrumen “Indeks Pelayanan Kapanewon” yang mencakup evaluasi terhadap ketepatan regulasi desa (APBKal dan RPKKal), penanganan kesejahteraan sosial, penjaminan ketentraman umum, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



- b. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 96,15 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 94,98. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 98,78%.
 - c. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 96,56 terjadi penurunan sebesar 1,58%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”.
- a. Diukur dengan indikator “Nilai AKIP PD”.
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83,00 (A). Dalam perhitungan realisasi tahun berjalan, di gunakan basis data N-1, karena untuk nilai AKIP 2025 belum keluar, masih dalam koreksi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sehingga dalam menghitung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Tahun 2024 Nilai AKIP kapanewon Paliyan adalah 81.90 (A). Persentase realisasi nilai AKIP tahun 2024 terhadap target mencapai 98.67%.
 - d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 81,05 (A) terjadi peningkatan sebesar 0,85%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”.
- a. Diukur dengan indikator “Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan”.
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.



c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 6 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 6. Dengan demikian kinerja Kapanewon Paliyan telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.

d. Capaian tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2025 yaitu 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Paliyan ke depan, sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator kemiskinan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk kritis dan aktif dalam penyampaian gagasan yang bertujuan dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	25
B. Capaian Kinerja Lainnya	50
C. Efisiensi Anggaran	51
D. Inovasi.....	54
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Langkah Perbaikan Kinerja	56
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025.....	12
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	13
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	14
Tabel II.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	17
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Panewu Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	19
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	20
Tabel II.7	Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Paliyan Tahun 2025	20
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.....	29
Tabel III.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026	35
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon Meningkatkan.....	37
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	42
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	



Perangkat Daerah	43
Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 ...	43
Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	44
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	45
Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45
Tabel III.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel III.15 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	47
Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	48
Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	48
Tabel III.18 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49
Tabel III.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	52
Tabel III.20 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Paliyan.....	5
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan	10
Gambar II.1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	21
Gambar II.2. Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	22
Gambar II.3. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM ASET)	23
Gambar II.4. Aplikasi Online Input Persediaan	23
Gambar II.5. Sistem informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (Sipanda)	24
Gambar III.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat semester II	38
Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon Perekaman KTP Elektronik dan Penyerahan Akta Kematian	38
Gambar III.3. Perumusan Musyawarah Kalurahan dalam Menyusun RKPKal dan Musrenbang Kapanewon.....	39
Gambar III.4. Monitoring Bencana dan Pembinaan Satlinmas dan Satgas Siaga Bencana.....	39
Gambar III.5. Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40
Gambar III.6. Fasilitasi Pengawasan Penyusunan dan Asistensi APBKal	40
Gambar III.7. Penyaluran Bantuan Sosial PAH dan Jamban.....	41
Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	51



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi



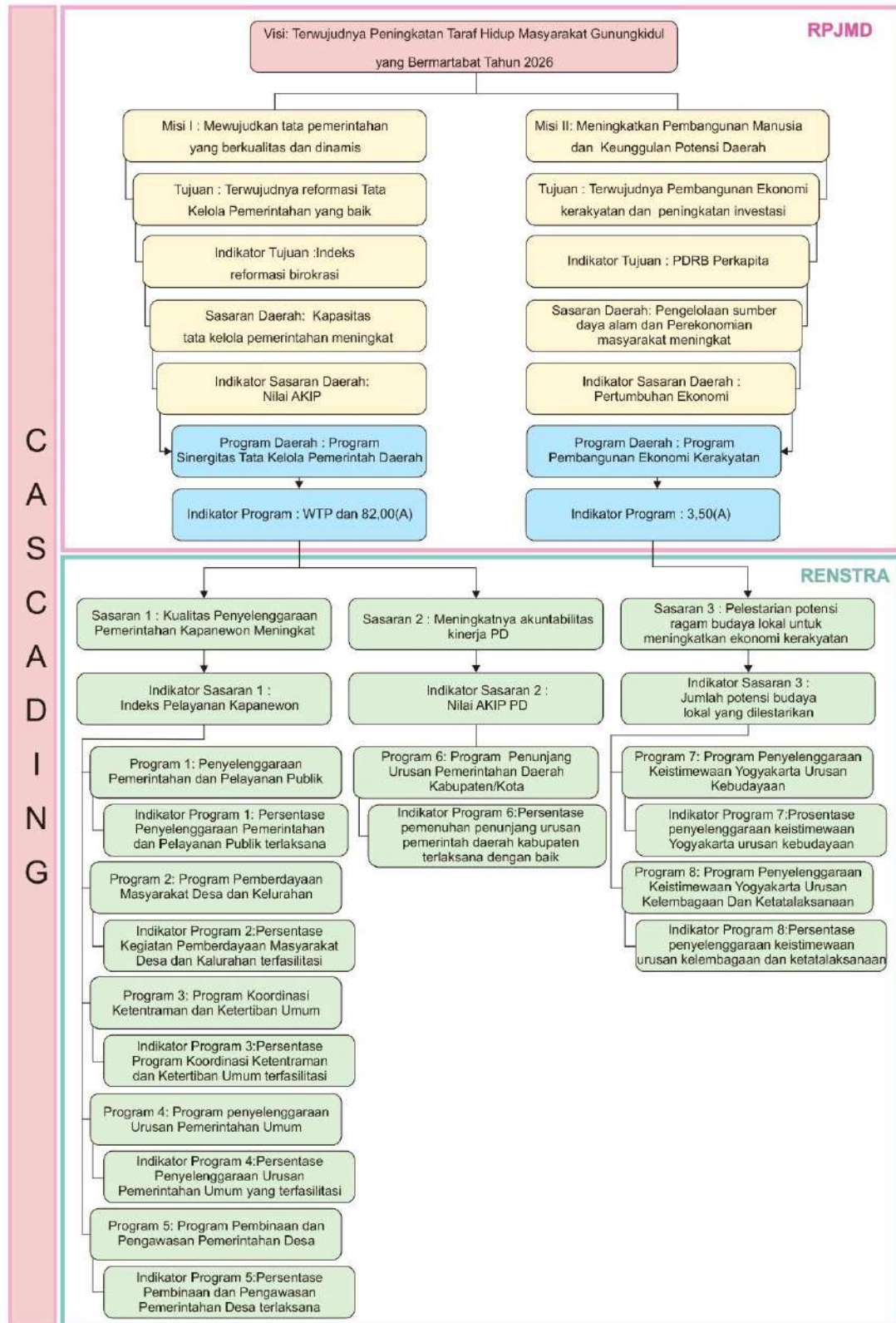
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Paliyan yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Panewu Paliyan kepada Bupati Gunungkidul.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

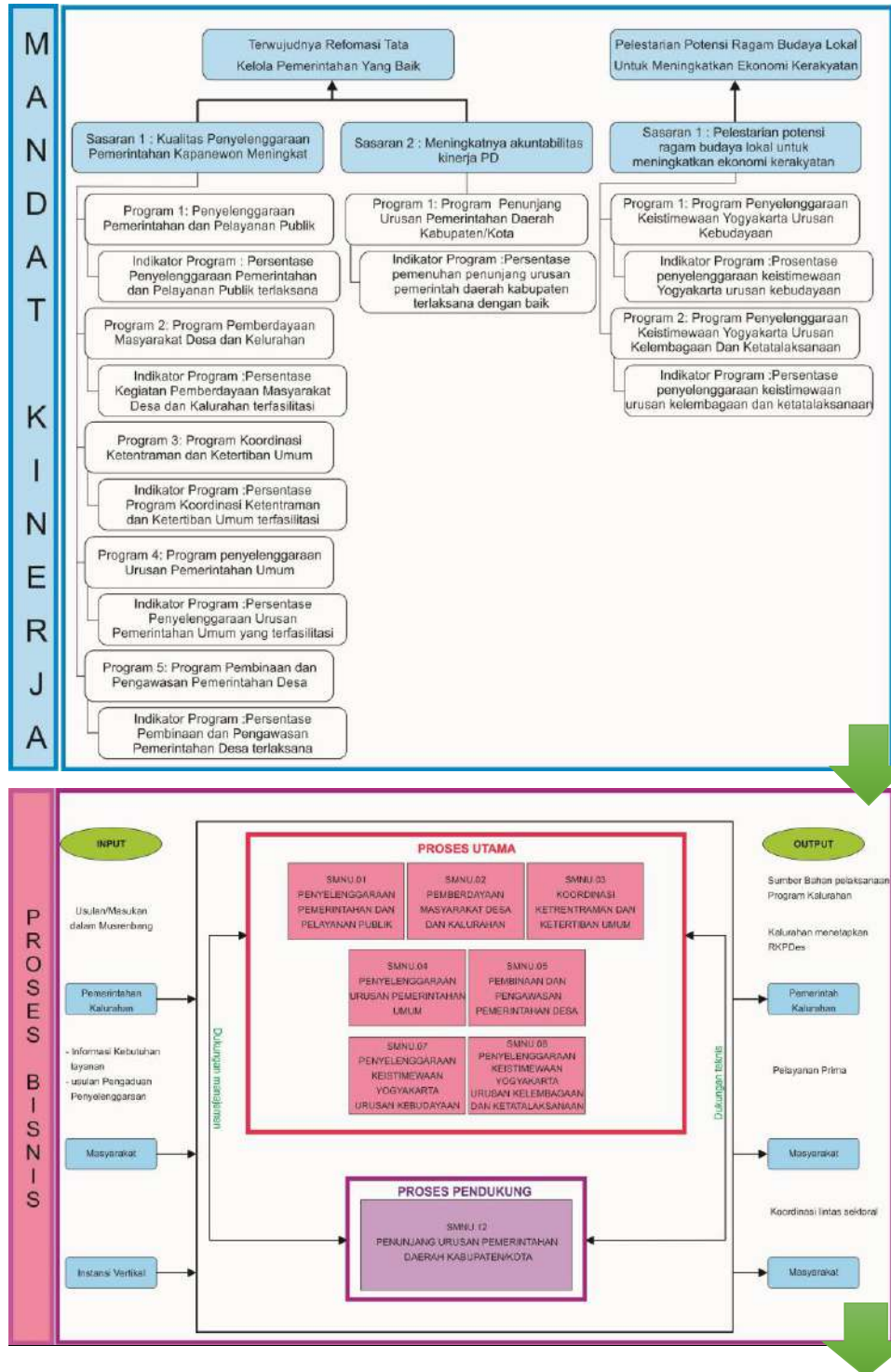


Gambar I.1. Cascading Kinerja



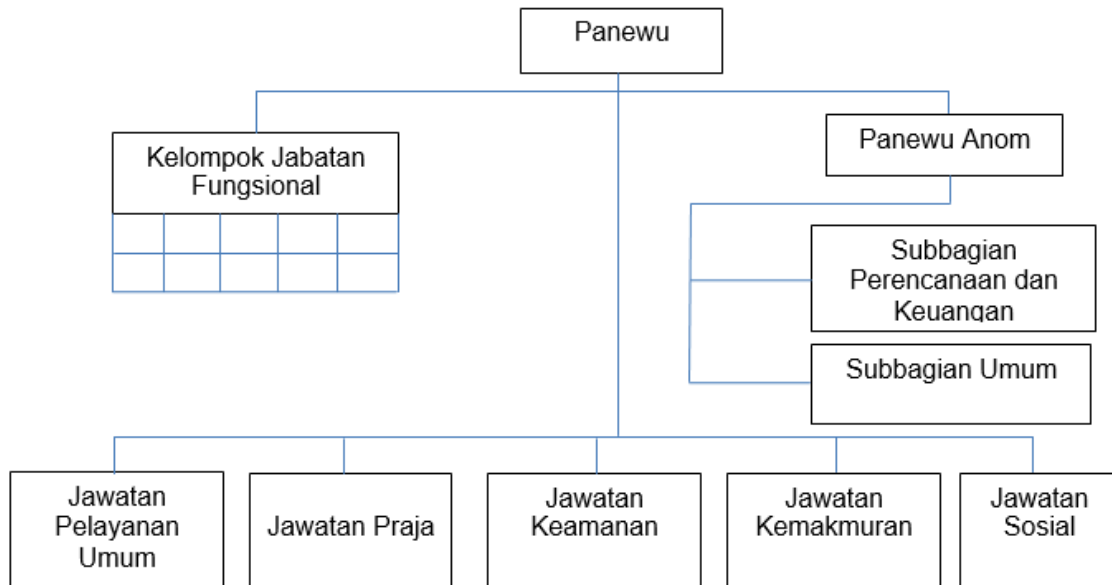
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Paliyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Paliyan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaa di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.



Dalam menyelenggarakan tugas–tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi–fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan Pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat kalurahan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang Mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kapanewon;
11. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang Menjadi wewenang Kapanewon;
12. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
13. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;



14. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk Operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan;
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Paliyan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas
2. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan
3. Masih rendahnya produktivitas UMKM.
4. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi terkait data-data pamong kalurahan.
5. Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap.
6. Adanya perubahan regulasi/peraturan yang akan mempengaruhi proses perencanaan di Kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu.
7. Adanya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke Kapanewon tetapi belum dapat dilaksanakan salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena belum ada pelatihan untuk sumber daya manusia dan belum ada sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.

F. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Anggaran

1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S 2	S 1	D 3	SM A		S 2	S 1	D 3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	1. Struktural	9	1	7	1		9	1	7	1		5	4
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	0					0						
	2. Pengawas	0					0						
	3. Pelaksana	9		3	1	5	9		3	1	5	7	2
C.	Jabatan Fungsional												
	1. Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	19	1	10	3	5	18	1	10	3	5	12	7

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Paliyan Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul relative sedang dengan komposisi jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (5%), S1 sebanyak 10 orang (55%), D2/3 sebanyak 3 orang (15%), dan SLTA sebanyak 5 orang (25%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki 12 orang lebih banyak dibanding perempuan, dari jumlah 19 pegawai, keberadaan 7 pegawai dengan jenis kelamin perempuan, 4 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

2. Dukungan Sarana Prasarana

Kapanewon Paliyan terus berupaya melaksanakan upaya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dukungan sarana-prasarana pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Aset Tetap Tanah	1 Unit	50.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	11 unit	318.296.300,00
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	230 unit	278.422.414,28
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8 unit	36.943.000,00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1 unit	485.000,00
6	Alat Laboratorium	1 unit	784.000,00
7	Komputer	29 unit	183.186.638,89
8	Bangunan Gedung	10 unit	925.671.819,72
9	Tugu Titik control/pasti	1 unit	20.028.000,00
10	Bangunan Air	1 unit	11.017.000,00
11	Instalasi	1 unit	1.500.000,00
12	Jaringan	2 unit	14.164.500,00
13	Barang Bercorak Kesenian /kebudayaan/Olahraga	31 unit	19.983.000,00
	Jumlah		1.860.481.672,89

Sumber: Laporan Rekap Inventaris Barang SKPD Tahun 2025 di Aplikasi SIM ASET

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, ruang dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam PANRB nomor 11 Tahun 2024 tentang



Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 3 m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja, kursi, tempat sampah, wastafel dan sabun cuci tangan.
- b. Bangunan ramah disabilitas
Kantor Kapanewon Paliyan telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet.
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan



3. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2025, Anggaran Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul semula Rp2.072.491.098,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.839.579.942,02 atau berkurang Rp232.911.155,98 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 0	Rp 0	
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp 0	Rp 0	
	Jumlah Pendapatan	Rp 0	Rp 0	
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 2.047.591.098,00	Rp 1.814.679.942,02	(Rp 232.911.155,98)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp 1.311.910.758,00	Rp 1.123.907.102,02	(Rp 188.003.655,98)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 679.680.340,00	Rp 634.772.840,00	(Rp 44.907.500,00)
5 1 05	Belanja Bantuan Sosial	Rp 56.000.000,00	Rp 56.000.000,00	
5 2	BELANJA MODAL	Rp 24.900.000,00	Rp 24.900.000,00	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 24.900.000,00	Rp 24.900.000,00	
	Jumlah Belanja	Rp 2.072.491.098,00	Rp 1.839.579.942,02	Rp 232.911.155,98
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp2.072.491.098,00)	(Rp 1.839.579.942,02)	(Rp 232.911.155,98)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 0	
	Pembiayaan Neto	Rp 0	Rp 0	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Paliyan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kapanewon Paliyan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon Paliyan dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan pembangunan Kapanewon Paliyan Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan



Selanjutnya Kapanewon Paliyan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	81,93	93.21	96.10	96.14	96.15	96.16	96.16
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	Nilai	76.98 (BB)	81.50 (A)	82.00 (A)	82.50 (A)	83.00 (A)	83.50 (A)	83.50 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	6	6	6	6	6	6

Sumber: Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai satndart pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemerdayaan masyarakat Kalurahan
		Peningkatan kapasitas Kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas Kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seuruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang Urusan PD
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya local	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik	24.365.000,00	21.115.000,00	(3.250.000,00)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.450.000,00	13.890.000,00	(1.560.000,00)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.450.000,00	13.890.000,00	(1.560.000,00)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.915.000,00	7.225.000,00	(1.690.000,00)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.915.000,00	7.225.000,00	(1.690.000,00)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.715.000,00	39.825.000,00	(11.890.000,00)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.720.000,00	30.480.000,00	(9.240.000,00)



Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemnerdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.680.000,00	17.570.000,00	(8.110.000,00)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.040.000,00	12.910.000,00	(1.130.000,00)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.995.000,00	9.345.000,00	(2.650.000,00)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.020.000,00	4.620.000,00	(400.000,00)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.975.000,00	4.725.000,00	(2.250.000,00)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	70.833.000,00	57.333.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.500.000,00	70.833.000,00	57.333.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.440.000,00	60.933.000,00	58.493.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.060.000,00	9.900.000,00	(1.160.000,00)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	101.227.900,00	87.625.400,00	(13.602.500,00)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.227.900,00	87.625.400,00	(13.602.500,00)



Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	93.362.900,00	81.680.400,00	(11.682.500,00)
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.865.000,00	5.945.000,00	(1.920.000,00)
Program Pembinaan dan Pengawasa Pemerintah Desa	149.930.000,00	135.380.000,00	(14.550.000,00)
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	149.930.000,00	135.380.000,00	(14.550.000,00)
Fasilitasi Penyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.205.000,00	1.915.000,00	(1.290.000,00)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.385.000,00	2.315.000,00	(1.070.000,00)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.550.000,00	7.680.000,00	(5.870.000,00)
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.700.000,00	1.910.000,00	(790.000,00)
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.310.000,00	1.580.000,00	(730.000,00)
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	118.930.000,00	115.430.000,00	(3.500.000,00)
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.850.000,00	4.550.000,00	(1.300.000,00)



Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	40.000.000,00	28.460.000,00	(11.540.000,00)
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	28.460.000,00	(11.540.000,00)
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	28.460.000,00	(11.540.000,00)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Paliyan Tahun 2025

Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.631.753.198,00	1.426.341.542,02	(205.411.655,98)
a.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.890.000,00	67.345.000,00	(8.545.000,00)
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.800.000,00	30.755.000,00	(2.045.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.370.000,00	730.000,00	(640.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.170.000,00	670.000,00	(500.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	32.050.000,00	31.170.000,00	(880.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.600.000,00	890.000,00	(710.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.010.000,00	1.820.000,00	(2.190.000,00)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.890.000,00	1.310.000,00	(1.580.000,00)
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.318.630.758,00	1.128.257.102,02	(190.373.655,98)
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.311.910.758,00	1.123.907.102,02	(188.003.655,98)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.780.000,00	1.780.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.940.000,00	2.570.000,00	(2.370.000,00)
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.984.800,00	5.454.800,00	(530.000,00)
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5.984.800,00	5.454.800,00	(530.000,00)
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.833.000,00	90.060.000,00	(6.773.000,00)
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.462.000,00	3.462.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.760.000,00	45.637.000,00	(3.123.000,00)
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	5.256.000,00	5.256.000,00	
	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	3.105.000,00	(345.000,00)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.705.000,00	31.400.000,00	(3.305.000,00)
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.000,00	700.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000,00	700.000,00	
f.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.014.640,00	74.824.640,00	810.000,00
	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	43.444.640,00	45.044.640,00	1.600.000,00
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.570.000,00	29.780.000,00	(790.000,00)
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.700.000,00	59.700.000,00	
	Penyedia Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000,00	42.100.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Paliyan Tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Panewu Paliyan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Panewu Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,15
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83.00(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

Pada tahun 2025, Panewu Paliyan melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu Paliyan Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,15
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83.00(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.7 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Paliyan Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 30.000.000,00	DAIS
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 28.460.000,00	DAIS
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 21.115.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 39.825.000,00	APBD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 70.833.000,00	APBD
6.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 87.625.400,00	APBD

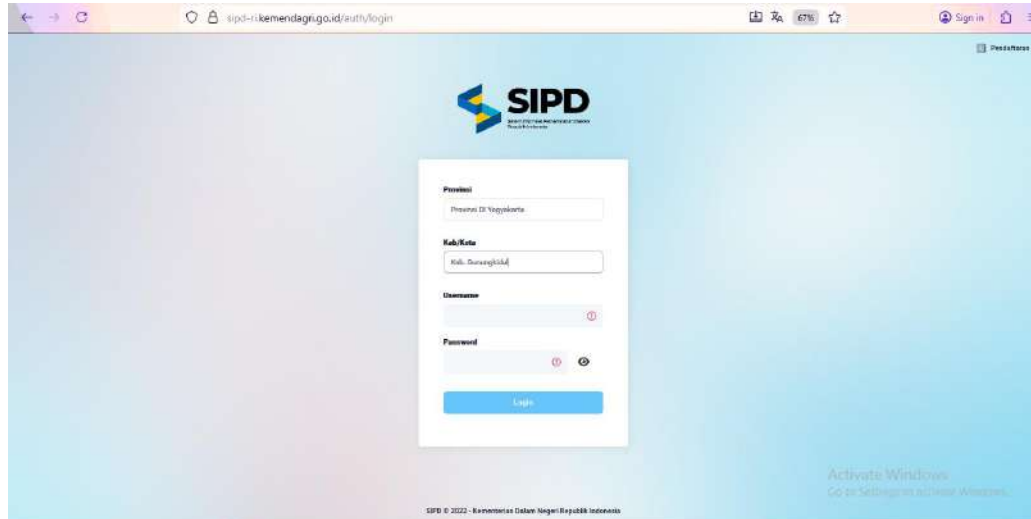


7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 135.380.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 1.466.332.433,00	APBD

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



2. Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan (SAKIP)

Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.2.E-SAKIP

3. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset).

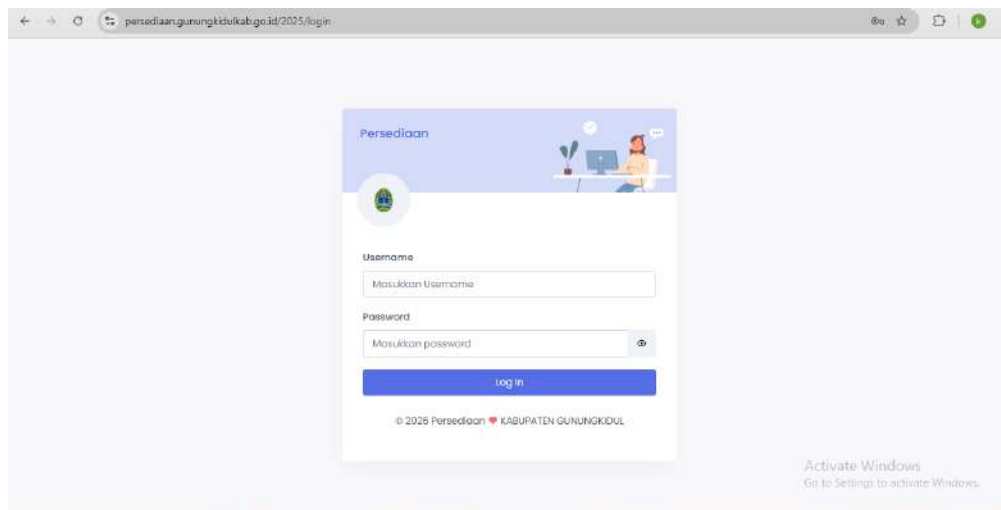
Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset Perangkat Daerah. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.3. SIM ASET

4. Aplikasi online input persediaan.

Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang di gunakan untuk mendukung kinerja dalam penusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:

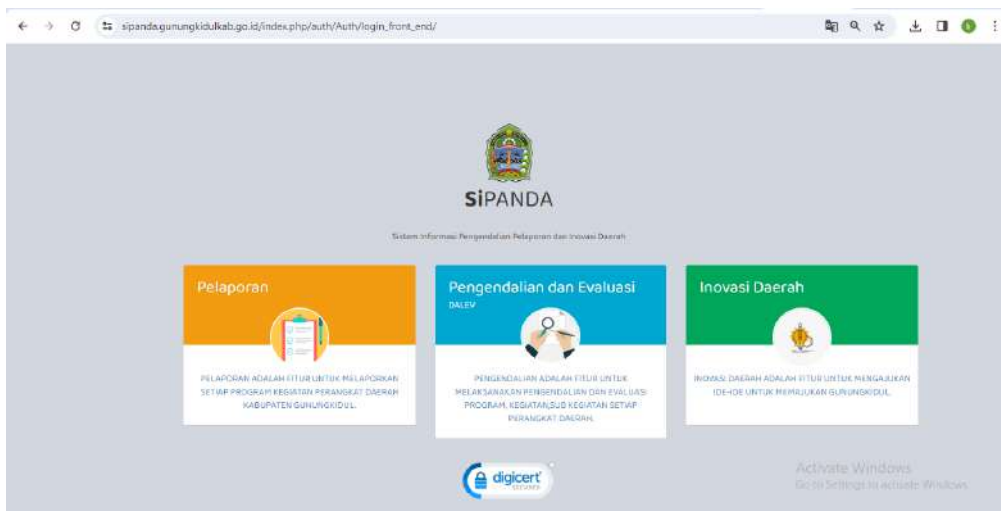


Gambar II.4. Aplikasi Online Input Persediaan



5. Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA)

Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) merupakan aplikasi yang di gunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Gambar II.5. SiPANDA



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Realisasi Anggaran
- C. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Kerangka pengukuran kinerja Kapanewon Paliyan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon Paliyan tahun 2025. Pencapaian IKU tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSE NTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,44	96,56	96,15	94,98	98,78	Sangat Tinggi	96,16
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,60 (A)	81,05 (A)	83,00 (A)	81,90 (A)	98,67	Sangat Tinggi	83,50 (A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	6	6	6	6	100	Sangat Tinggi	6

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Kapanewon Paliyan dianalisis secara terpadu karena menggunakan indikator kinerja yang sama atau sepadan.



Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan dan sasaran, sehingga capaian sasaran strategis secara langsung merefleksikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon. Pencapaian tujuan ini didukung dengan 2 sasaran yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran tujuan dan sasaran yaitu kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Paliyan dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Kinerja sasaran kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	<p><i>Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Paliyan kepada masyarakat.</i></p> <p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBD benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p>



No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $\frac{\sum \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1 Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $\frac{\sum \text{Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase KK miskin yang tertangani = $\frac{\sum \text{KK miskin penerima bantuan}}{\sum \text{KK Miskin}} \times 100\%$
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $\frac{\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$
			<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks kepuasan masyarakat (merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Paliyan

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,15	94,98	98,78	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 98,78%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 94,98 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 96,15.



Penghitungan capaian kinerja untuk indikator “Indeks Pelayanan Kapanewon” didasarkan pada formulasi penilaian terhadap lima aspek pelayanan sebagai berikut:

- Benar dan tepat waktu dalam menyusun APBKal = $20\% \times (\text{jumlah desa yang menyusun APBKal tepat waktu} / \text{Jumlah desa dikapanewon}) \times 100$
 - Benar dan tepat waktu dalam menyusun RKPKal = $20\% \times (\text{jumlah desa yang menyusun RKPKal tepat waktu} / \text{Jumlah desa dikapanewon}) \times 100$
 - Jumlah KK miskin = $20\% \times (\text{jumlah KK miskin yang tertangani} / \text{KK jumlah KK miskin}) \times 100$
 - Jumlah penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $20\% \times (\text{Jumlah penanganan ketentraman} / \text{jumlah kasus penanganan ketentraman}) \times 100$
 - Nilai IKM = $20\% \times (\text{nilai} / 100) \times 100$
- Indeks Pelayanan Kapanewon = \sum total nilai dari 5 item tersebut di atas.

Capaian Indeks Pelayanan Kapanewon tersebut diperoleh dari:

1. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 7 kalurahan di Kapanewon Paliyan, semua Kalurahan dapat menetapkan APBKal 2026 dengan benar dan tepat waktu yaitu di Bulan Desember 2025.

Perbandingan dengan standar nasional.

Realisasi ketepatan waktu penetapan APBKal dan RKPKal telah sesuai dengan peraturan di tingkat nasional. Ketepatan waktu penetapan APBKal juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa APBKal



ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun n-1. Waktu penetapan APBKal masing masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Karangasem : 30 Desember 2025
- b. Kalurahan Sodo : 30 Desember 2025
- c. Kalurahan Karangduwet : 31 Desember 2025
- d. Kalurahan Mulusan : 30 Desember 2025
- e. Kalurahan Pampang : 31 Desember 2025
- f. Kalurahan Giring : 31 Desember 2025
- g. Kalurahan Grogol : 31 Desember 2025

APBKal benar adalah APBKal yang ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kapanewon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panewu, sebagai berikut:

- a. Kalurahan Karangasem: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 075 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangasem Tahun Anggaran 2026;
- b. Kalurahan Sodo: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 076 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo Kapanewon Paliyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sodo Tahun Anggaran 2026;
- c. Kalurahan Karangduwet: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 077 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Karangduwet Kapanewon Paliyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangduwet Tahun Anggaran 2026;
- d. Kalurahan Mulusan: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 078 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan tentang Anggaran



Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mulusan Tahun Anggaran 2026;

- e. Kalurahan Pampang: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 079 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pampang Kapanewon Paliyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pampang Tahun Anggaran 2026;
- f. Kalurahan Giring: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 080 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2026;
- g. Kalurahan Grogol: Surat Keputusan Panewu Paliyan Nomor 081 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Grogol Kapanewon Paliyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Grogol Tahun Anggaran 2026.

2. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 7 kalurahan di Kapanewon Paliyan, semua Kalurahan dapat menetapkan RKPKal 2026 dengan benar dan tepat yaitu di bulan September 2025.

Perbandingan dengan standar nasional.

Ketepatan waktu penetapan RKPKal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyebutkan bahwa RKPKal mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Kalurahan paling lambat akhir bulan



September tahun berjalan. Waktu penetapan RKPKal masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Karangasem : 30 September 2025
- b. Kalurahan Karangduwet : 22 September 2025
- c. Kalurahan Grogol : 30 September 2025
- d. Kalurahan Pampang : 30 September 2025
- e. Kalurahan Giring : 30 September 2025
- f. Kalurahan Mulusan : 30 September 2025
- g. Kalurahan Sodo : 26 September 2025

RKPKal benar ditentukan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kapanewon Paliyan, namun demikian sesuai dengan ketentuan tidak ada penetapan hasil evaluasi RKPKal.

3. Persentase KK miskin yang tertangani

Persentase KK miskin yang tertangani tercapai 100%. Dari target 306 terdiri dari 295 tangki air bersih, 3 KK untuk bantuan sosial Penampungan Air Hujan (PAH), dan 8 KK untuk bantuan sosial Jamban Sehat, terealisasi 305 terdiri dari 295 tangki air bersih, 3 KK untuk bantuan sosial Penampungan Air Hujan (PAH), dan 7 KK untuk bantuan sosial Jamban Sehat. Pada belanja bantuan sosial Jamban terdapat 1 KK yang tidak terealisasi atas nama Wasiran alamat Karangasem A, Karangasem, Paliyan karena sudah tidak beralamat di paliyan dan tidak melaporkan pindah alamat, sehingga proses penyaluran bantuan sosial tidak dilaksanakan.

4. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Dari 1 kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum dapat tertangani seluruhnya.

5. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, indeks kepuasan Masyarakat Kapanewon Paliyan



pada tahun 2025 tercapai 83,22. Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan. Angka IKM sebesar 83,22 menunjukkan pelayanan kapanewon termasuk dalam kategori Baik. Adapun capaian nilai IKM Kapanewon Paliyan sebesar 83,22 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKM Kabupaten Semester 1 2025 yang tercapai sebesar 83,118.

Dengan capaian kinerja dari pelayanan yang dilakukan Kapanewon Paliyan kepada masyarakat di atas dan dengan menggunakan formulasi penghitungan capaian kinerja:

$$= \Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$$

maka capaian Indeks Pelayanan Kapanewon adalah:

$$= \Sigma [20\% \times 100\%] + [20\% \times 100\%] + [20\% \times 91,67\%] + [20\% \times 83,22\%] \\ = 94,98$$

Realisasi kinerja sebesar 94,98% pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,44	96,56	94,98	96,16	98,77

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif



Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.6 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat berikut:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	98,78	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	Sangat Tinggi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.



Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Rencana Tindaklanjut Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN RENCANA TINDAKLANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Kapanewon Paliyan Semester II Tahun 2025			
Jenis Pelayanan yang dinilai	Keberhasilan	Unsur Pelayanan	NILAI SRM
<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Perakaman KTP Elektronik (e-KTP) Pelayanan Pindah Masuk Pelayanan Pindah Keluar Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Pelayanan Akta Kematian Pelayanan Akta Kelahiran Pelayanan Rekomendasi BPJS PBI Pelayanan Dispensasi Nikah Pelayanan Legalisasi Pelayanan Proposal Jawatan Kemakmuran Pelayanan Proposal Jawatan Sosial 	<p>Sampel 327 Orang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur waktu penyelesaian pelayanan biaya/tarif produk, spesifikasi jenis pelayanan kompetensi pelaksana perilaku pelaksana penanganan pengaduan, saran dan masukan sarana dan prasarana 	<p>83.22</p> <p>Mutu Pelayanan : B Kinerja Unit Pelayanan : Baik</p>
RENCANA TINDAK LANJUT			
No	Prioritas Unsur	Program / kegiatan	Penanggung Jawab
1	Waktu Penyelesaian dokumen	Kapastian penyelesaian berkas permohonan pelayanan	Kepala Jawatan Pelayanan Umum dan Operator SIAK Dukcapil
2	Sarana Prasarana	Penentuan Lokasi parkir kendaraan pengguna layanan	Kepala Sub Bagian Umum

Gambar III.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester II

- b. Pelayanan Umum Kapanewon Pelayanan Perakaman KTP Elektronik Penyandang Disabilitas dan Penyerahan Akta Kematian



Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon Pelayanan Perakaman KTP Elektronik Penyandang Disabilitas dan penyerahan Akta Kematian



2. Evaluasi Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Perumusan Musyawarah Kalurahan dalam menyusun RKPKal dan Musrenbang Kapanewon



Gambar III.3. Perumusan Musyawarah Kalurahan dalam menyusun RKPKal dan Musrenbang Kapanewon

3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Monitoring bencana hujan lebat di sertai angin dan Pembinaan Satlinmas dan Satgas Bencana yang di ikuti Linmas Kapanewon dan Jogoboyo



Gambar III.4. Monitoring bencana dan Pembinaan Satlinmas dan Satgas Bencana

4. Evaluasi Capaian Program Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Memfasilitasi pelatihan Ketentraman dan Ketertiban Umum (penyakit masyarakat dan Linmas)



Gambar III.5. Fasilitas pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitas dan pengawasan penyusunan APBKal dan Asistensi APBKal



Gambar III.6. Fasilitas, pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal

b. Penyaluran Bantuan Sosial Bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) dan Jamban Sehat bagi KK Miskin



Gambar III.7. Penyaluran Bantuan Sosial PAH dan Jamban

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan Kuantitas SDM pada Tingkat Kecamatan maupun kalurahan sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal.
2. Peraturan atau dasar penyusunan APBKal bersifat mendadak.
3. Penyusunan RKPKal kurang maksimal karena setelah ditetapkan masih ada program wajib yang harus dilaksanakan.
4. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat dan daerah serta realita lapangan.
5. Indikator kemiskinan sering berubah/ kriteria penerima bantuan berubah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem manajemen kinerja untuk memastikan setiap staf dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai bagaimana penyusunan APBKal, RKPKal dapat tersusun dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak dan meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring.
4. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta konsultasi dengan pihak terkait.



Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

1. Adanya kepemimpinan yang efektif dan berkualitas di tingkat kapanewon, yang mampu memberikan arahan, visi, dan memotivasi aparatur serta masyarakat.
2. Aktifnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah di tingkat Kapanewon, kalurahan maupun pusat.
4. Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai
5. Adanya kontrol secara internal di Kapanewon Paliyan.
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
7. Peran aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembanguna.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Paliyan Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)



Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	83,00	81,90*	98,67	Sangat Tinggi

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Target kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 83,00, dan sampai laporan ini disusun, Nilai AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Kapanewon Paliyan mendapatkan nilai 81,90(A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Nilai AKIP Kabupaten tahun 2025 yang sebesar 77,08 dengan kategori B maka capaian kinerja Kapanewon Paliyan lebih tinggi dibanding realisasi kinerja Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/41 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Paliyan terdapat tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut:

Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan rewiu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.pada periode	Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya serta menyelaraskan target pada perjanjian kinerja bawahan



		selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan	terhadap pimpinan pada periode perencanaan selanjutnya
2	Pengukuran Kinerja	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
3	Pelaporan Kinerja	Menjelaskan permasalahan yang menghambat target kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkatkan secara memadai yang seharusnya dapat tercapai pada tahun tersebut serta strategi pemecahan masalah dan upaya-upaya yang dilakukan	Akan ditindaklanjuti dengan menyajikan laporan yang dilengkapi dengan permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja serta strategi pemecahan masalah dan upaya yang dilakukan
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja	Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dengan Memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,60	81,05	81,90	83,50	98,08

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat jika dibanding capaian tahun 2024 yaitu 81,05 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>

Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	98,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 pada Kapanewon Paliyan, yaitu dengan melaksanakan:

- a. Penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja
- b. Reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja
- c. Penyesuaian target kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja pada perubahan Perjanjian Kinerja 2025
- d. Koordinasi dan sosialisasi hasil evaluasi SAKIP/berkala triwulanan
- e. Koordinasi internal secara berkala triwulanan

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapaewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Realisasi pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak mencapai target yaitu gaji ASN karena ada ASN.
2. Realisasi pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak mencapai target karena pembayaran rekening air, listrik dan telepon disesuaikan dengan tagihan yang muncul pada bulan tersebut.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembalikan sisa anggaran
2. Melakukan evaluasi untuk tahun selanjutnya

Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Paliyan dianalisis



secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

3. Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah potensi budaya yang ada dan masih dilestarikan di Kapanewon

Tabel III.15 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	6	6	100	Sangat Tinggi

Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6 terealisasi sebesar 6 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja 100% pada tahun 2025 sama jika dibandingkan pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	6	6	6	6	100

Konsistensi capaian kinerja Pemerintah Kapanewon Paliyan pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif



Tabel III.18 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100	<ol style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Paliyan antara lain:

- a. Tidak semua seni budaya yang ada di Kapanewon Paliyan dapat menampilkan karyanya
- b. Durasi waktu tampil terbatas
- c. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharainya

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki konsep perencanaan terkait gelar budaya
- b. Aktif konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan pihak-pihak terkait.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- a. Terasilitasinya koordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Paliyan meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Paliyan pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Paliyan. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.



Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Paliyan. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Paliyan.



Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapaneon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tertanggal 02 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.839.579.942,02 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp1.751.739.695,00 atau 95,22% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp87.840.247,02 yang terdiri dari:

- Sisa belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp1.084.250,00



- Sisa belanja barang dan jasa sebesar Rp2.198.590,00
- Sisa belanja bantuan sosial sebesar Rp4.755.740,00
- Sisa belanja pegawai sebesar Rp79.801.667,02

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.426.341.542,00	1.343.672.344,00	94,20	82.669.198,00	6,15
a.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.345.000,00	67.117.900,00	99,66	227.100,00	0,34
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.128.257.102,02	1.048.312.330,00	92,91	79.944.772,02	7,63
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.454.800,00	5.422.108,00	99,40	32.692,00	0,60
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.060.000,00	88.861.823,00	98,67	1.198.177,00	1,35
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	700.000,00	700.000,00	100	0,00	0,00
f.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.824.640,00	73.558.483,00	98,31	1.266.157,00	1,72
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.700.000,00	59.699.700,00	100	300,00	0,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00	0,00
1)	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00	0,00
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	28.460.000,00	28.459.560,00	100	440,00	0,00
1)	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	28.460.000,00	28.459.560,00	100	440,00	0,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik	21.115.000,00	21.064.668,00	99,76	50.332,00	0,24
1)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.890.000,00	13.889.766,00	100	234,00	0,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.225.000,00	7.174.902,00	99,31	50.098,00	0,70
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.825.000,00	39.812.200,00	99,97	12.800,00	0,03
1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.480.000,00	30.479.890,00	100	110,00	0,00
2)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.345.000,00	9.332.310,00	99,86	12.690,00	0,14
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.833.000,00	70.830.461,00	100	2.539,00	0,00
1)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.833.000,00	70.830.461,00	100	2.539,00	0,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	87.625.400,00	87.624.196,00	100	1.204,00	0,00
1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.625.400,00	87.624.196,00	100	1.204,00	0,00
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	135.380.000,00	130.276.266,00	96,23	5.103.734,00	3,92
1)	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	135.380.000,00	130.276.266,00	96,23	5.103.734,00	3,92
	JUMLAH	1.839.579.942,02	1.751.739.695,00	95,22	87.840.247,02	5,01

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	96,15	94,98	98,78	354.778.400,00	349.607.791,00	98,54
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	A (83,00)	*BB (81,90)	98,67	1.426.341.542,02	1.343.672.344,00	94,20
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal	6	6	100	58.460.000,00	58.459.560,00	99,99



No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
	Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan						
Jumlah Belanja Total					1.839.579.942,02	1.751.739.695,00	95,22

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Semanu 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan layanan google drive untuk percepatan komunikasi, informasi dan rekapitulasi pengambilan data masing-masing jawatan.
2. Pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook dan web sebagai alat komunikasi dan penyaluran informasi dengan masyarakat sehingga Mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital untuk pengumpulan masukan, pengawasan, dan pelaporan kondisi di Kapanewon.
3. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam akses dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi, seperti layanan online dan mobile untuk masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Paliyan, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, kinerja Kapanewon Paliyan pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Paliyan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam



pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pengentasan kemiskinan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Implementasikan sistem monitoring real-time untuk secara kontinu memantau capaian indikator kinerja dengan platform teknologi informasi dan media social dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien.



3. Membangun mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait layanan publik dan kebijakan Kapanewon melalui survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/social media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon.
5. Secara berkala melakukan retrospektif untuk mengevaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya*
- 2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
- 4. Capaian Kinerja Tahun 2025*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M

Jabatan : Panewu Paliyan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,


DASNO, S.I.P.,M.M

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON PALIYAN

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,15
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83.00 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 60.000.000,00	DAIS

2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp.	40.000.000,00	DAIS
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	24.365.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	51.715.000,00	APBD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	13.500.000,00	APBD
6.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	101.227.900,00	APBD
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	149.930.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp.	1.631.753.198,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

 SUNARYANTA

Pihak Kesatu,

 DASNO S.I.P., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMINTA, S.Sos

Jabatan : Panewu Anom Paliyan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M

Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,



DASNO, S.I.P.,M.M

SUDARMINTA, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	8.28
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	79,33
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	43.87
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	15
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	73
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	173

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1.631.753.198,00	APBD
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 75.890.000,00	APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.318.630.758,00	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.984.800,00	APBD
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 96.833.000,00	APBD
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 700.000,00	APBD
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.014.640,00	APBD
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.700.000,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

SUDARMINTA, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPANGGIH, S.I.P

Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUDARMINTA, S.Sos

Jabatan : Panewu Anom Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

SUPANGGIH, S.I.P



Pihak Kedua,

SUDARMINTA, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17
7.	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	252

8.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.800.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.370.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.170.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 32.050.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 1.600.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4.010.000,00	APBD
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.311.910.758,00	APBD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.780.000,00	APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 4.940.000,00 APBD

Paliyan, 6 Januari 2025



Pihak Kedua,

SUDARMINTA, S.Sos

Pihak Kesatu,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

SUPANGGIH, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGATIJO, S.I.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUDARMINTA, S.Sos
Jabatan : Panewu Anom Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUDARMINTA, S.Sos

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,


NGATIJO, S.I.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	31
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
7.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13
9.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	54

11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	141
13.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21
14.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.890.000,00	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.984.800,00	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.462.000,00	APBD
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.760.000,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.256.000,00	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.450.000,00	APBD
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1.200.000,00	APBD

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 34.705.000,00	APBD
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 700.000,00	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 43.444.640,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 30.570.000,00	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 42.100.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.900.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 8.000.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.700.000,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



 SUDARMINTA, S.Sos

Pihak Kesatu,



 NGATIJO, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFATUL LATIFAH, S.I.P
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



DASNO, S.I.P.,M.M

LUTFATUL LATIFAH, S.I.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	24
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 8.915.000,00	APBD
1.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 8.915.000,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

LUTFATUL LATIFAH, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI SURAJIYAH, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M

Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

UMI SURAJIYAH, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	2
1.2.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18
1.3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4
1.4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1
1.5.	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 25.150.000,00	APBD
1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	Rp 3.205.000,00	APBD
1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 3.385.000,00	APBD
1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 13.550.000,00	APBD
1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Rp 2.700.000,00	APBD
1.5 Rekomendasi pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 2.310.000,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

 DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

 UMI SURAJIYAH, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI YULI PURNOMO, S.I.P

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M

Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M



ANDRI YULI PURNOMO, S.I.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	3
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	8
3.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	3
3.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2

4.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
4.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
5.	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	1
5.1	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 15.450.000,00	APBD
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp 15.450.000,00	APBD
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 118.930.000,00	APBD
2.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 118.930.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 5.020.000,00	APBD
3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 5.020.000,00	APBD

4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 11.060.000,00	APBD
4.1 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp 11.060.000,00	APBD
5. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp 60.000.000,00	APBD
5.1 Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Rp 60.000.000,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

ANDRI YULI PURNOMO, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDIASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

WIDIASTUTI, S.Sos



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks	9,5
1.1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	9
1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	3
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2
3.	Tersusunya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	2
3.1	Tersusunya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 41.295.000,00	APBD
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 25.680.000,00	APBD
1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 14.040.000,00	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 6.975.000,00	APBD
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Rp 6.975.000,00	APBD
3.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Rp 40.000.000,00	APBD
3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 40.000.000,00	APBD

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,



WIDIASTUTI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPANGGIH, S.I.P
Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

DASNO, S.I.P.,M.M


SUPANGGIH, S.I.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	39,5
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75

2.2	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	16
3.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.440.000,00	APBD
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 2.440.000,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 101.227.900,00	APBD
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp 93.362.900,00	APBD
2.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 7.865.000,00	APBD

<p>3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Rp 5.850.000,00</p>	<p>APBD</p>
<p>3.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p>	<p>Rp 5.850.000,00</p>	<p>APBD</p>

Paliyan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua



DASNO, S.I.P., M.M

Pihak Kesatu



SUPANGGIH, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DASNO, S.I.P., M.M.

Jabatan : Panewu Paliyan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 04 September 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

DASNO, S.I.P., M.M

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON PALIYAN**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,15
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83.00 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 30.000.000,00	DAIS
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 28.460.000,00	DAIS
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 21.115.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 39.825.000,00	APBD
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 70.833.000,00	APBD
6.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 87.625.400,00	APBD
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 135.380.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1.426.341.542,02	APBD

Wonosari, 04 September 2025

Pihak Kedua,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,



DASNO, S.I.P., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMINTA, S.Sos
Jabatan : Panewu Anom Paliyan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

SUDARMINTA, S.Sos

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM KAPANEWON PALIYAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tercapainya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	8.28
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	79,33
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	43.87
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	15
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	73
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	173

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1.426.341.542,02	APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 67.345.000,00	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.128.257.102,02	APBD
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.454.800,00	APBD
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 90.060.000,00	APBD
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 700.000,00	APBD
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.824.640,00	APBD
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.700.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

SUDARMINTA, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦁꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPANGGIH, S.I.P

Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUDARMINTA, S.Sos

Jabatan : Panewu Anom Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



SUDARMINTA, S.Sos

SUPANGGIH, S.I.P

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17
7.	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	252

8.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	13

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.755.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 730.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 670.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 31.170.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 890.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.820.000,00	APBD
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.123.907.102,02	APBD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.780.000,00	APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.570.000,00 APBD

Paliyan, 04 September 2025



Pihak Kedua,

SUDARMINTA, S.Sos

Pihak Kesatu,

SUPANGGIH, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦶꦪꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULYONO
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUDARMINTA, S.Sos
Jabatan : Panewu Anom Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

MULYONO



SUDARMINTA, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG UMUM KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	31
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
6.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
7.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10
9.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	54

		Air dan Listrik yang Disediakan		
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	141
13.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21
14.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.310.000,00	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.454.800,00	APBD
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.462.000,00	APBD
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.637.000,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.256.000,00	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.105.000,00	APBD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1.200.000,00	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 31.400.000,00	APBD
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 700.000,00	APBD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 45.044.640,00	APBD
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 29.780.000,00	APBD
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 42.100.000,00	APBD
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.900.000,00	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 8.000.000,00	APBD
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.700.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025



Pihak Kedua,

SUDARMINTA, S.Sos

Pihak Kesatu,

MULYONO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI SURAJIYAH, S.Sos
Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



DASNO, S.I.P.,M.M

UMI SURAJIYAH, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	2
1.2.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18
1.3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4
1.4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1
1.5.	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 14.400.000,00	APBD
1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	Rp 1.915.000,00	APBD
1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 2.315.000,00	APBD
1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 7.680.000,00	APBD
1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Rp 1.910.000,00	APBD
1.5 Rekomendasi pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.580.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

UMI SURAJIYAH, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPANGGIH, S.I.P
Jabatan : Plt. Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

DASNO, S.I.P.,M.M

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu

SUPANGGIH, S.I.P

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON PALIYAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	39,5
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75

2.2	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	16
3.	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
3.1	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Dokumen	2

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 60.933.000,00	APBD
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 60.933.000,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 87.625.400,00	APBD
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp 81.680.400,00	APBD
2.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 5.945.000,00	APBD

3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	4.550.000,00	APBD
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp	4.550.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025



Pihak Kedua

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu

SUPANGGIH, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI YULI PURNOMO, S.I.P
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

ANDRI YULI PURNOMO, S.I.P

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL KAPANEWON PALIYAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	3
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	32
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	8
3.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	3
3.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2

4.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
4.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
5.	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	1
5.1	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 13.890.000,00	APBD
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Rp 13.890.000,00	APBD
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 115.430.000,00	APBD
2.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 115.430.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 4.620.000,00	APBD
3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.	Rp 4.620.000,00	APBD

4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	9.900.000,00	APBD
4.1 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp	9.900.000,00	APBD
5. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp	30.000.000,00	APBD
5.1 Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Rp	30.000.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Pihak Kesatu,

ANDRI YULI PURNOMO, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDIASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

WIDIASTUTI, S.Sos



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON PALIYAN**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks	9,5
1.1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	9
1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9
2.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	3
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2
3.	Tersusunya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	2
3.1	Tersusunya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 30.480.000,00	APBD
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 17.570.000,00	APBD
1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 12.910.000,00	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 4.275.000,00	APBD
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Rp 4.275.000,00	APBD
3.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Rp 28.460.000,00	APBD
3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp 28.460.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kedua,

 DASNO, S.I.P., M.M

Pihak Kesatu,

 WIDIASTUTI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77 Paliyan Gunungkidul 55871 Telepon:085101489296
Posel: paliyan@gunungkidulkab.go.id Laman: paliyan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFATUL LATIFAH, S.I.P
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DASNO, S.I.P.,M.M
Jabatan : Panewu Paliyan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P.,M.M

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

LUTFATUL LATIFAH, S.I.P

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON PALIYAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	24
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 7.225.000,00	APBD
1.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Rp 7.225.000,00	APBD

Paliyan, 04 September 2025

Pihak Kedua,

DASNO, S.I.P., M.M

Pihak Kesatu,

LUTFATUL LATIFAH, S.I.P

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.


Sektor,
Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Panewu Paliyan Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat Inspektur Daerah

Nomor:

Tanggal: 7 Juli 2025

**HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024
PADA KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
PERENCANAAN KINERJA					
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan, kurang menantang. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya dalam laporan kinerja sebesar 96,44 sedangkan target Tahun 2024 sebesar 96,16	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis	Bukti penetapan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya serta menyelaraskan target pada perjanjian kinerja bawahan terhadap pimpinan pada periode perencanaan selanjutnya (Renstra 2025 - 2029, Perubahan Perjanjian Kinerja, dan/atau dokumen perencanaan kinerja lainnya yang mendukung)	Surat Pernyataan Panewu Paliyan Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya dan Konsep Renstra Tahun 2025-2029	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi
PENGUKURAN KINERJA					
2.	Tidak ada catatan evaluasi	Tidak ada rekomendasi	--	--	--

PELAPORAN KINERJA					
3.	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum menjelaskan permasalahan yang menghambat target kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan secara memadai yang seharusnya dapat tercapai pada tahun tersebut serta strategi pemecahan masalah dan upaya-upaya yang dilakukan	Menjelaskan permasalahan yang menghambat target kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkatkan secara memadai yang seharusnya dapat tercapai pada tahun tersebut serta strategi pemecahan masalah dan upaya-upaya yang dilakukan	Laporan Kinerja menyajikan permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja serta strategi pemecahan masalah dan upaya yang dilakukan	Surat Pernyataan Panewu Paliyan untuk menyajikan Laporan Kinerja dengan menyajikan permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja serta strategi pemecahan masalah dan upaya yang dilakukan	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja	Laporan Kinerja yang menyajikan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Internal	Surat Pernyataan Panewu Paliyan untuk memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Internal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi



 Inspektur,

 Saptoyo, S.Sos, M.Si.

 Pembina Utama Muda, IV/c

 NIP 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PALIYAN

ꦏꦧꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀

Jalan Raya Paliyan 77, Paliyan, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55871
Laman paliyan.gunungkidulkab.go.id; Posel Paliyan@gunungkidulkab.go.id

Paliyan, 3 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/177
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Internal pada
Kapanewon Paliyan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/41 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dasno, S.IP, MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197007081992031008

Tembusan:

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat

Nomor : 700.1.2.7/177

Tanggal : 3 Juli 2025

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN REKOMENDASI EVALUASI AKIP TAHUN 2024

PD : Kapanewon Paliyan

No	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan revidi dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan	Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya serta menyelaraskan target pada perjanjian kinerja bawahan terhadap pimpinan pada periode perencanaan selanjutnya
2	Pengukuran Kinerja	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
3	Pelaporan Kinerja	Menjelaskan permasalahan yang menghambat target kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkatkan secara memadai yang seharusnya dapat tercapai pada tahun tersebut serta strategi pemecahan masalah dan upaya-upaya yang dilakukan	Akan ditindaklanjuti dengan menyajikan laporan yang dilengkapi dengan permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja serta strategi pemecahan masalah dan upaya yang dilakukan
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja	Melakukan Perbaikan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dengan Memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP



Paliyan,

Dasno, S.IP, MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197007081992031007

**CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KAPANEWON PALIYAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM SERTA KEUANGAN AKUMULASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						PERMASALAHAN DAN SOLUSI
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	% CAPAIAN (8/6*100)	KEUANGAN (Rp)	% CAPAIAN (10/7*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat		Indeks Pelayanan Kapanewon	96,15	354.778.400,00	94,98	98,783	349.607.791,00	98,54	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksana	100	21.115.000,00	100	100	21.064.668,00	99,76	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	39.825.000,00	100	100	39.812.200,00	99,97	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	70.833.000,00	100	100	70.830.461,00	100,00	
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	87.625.400,00	100	100	87.624.196,00	100,00	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	135.380.000,00	100	100	130.276.266,00	96,23	sisa anggaran karena belanja bantuan sosial Jamban terdapat 1 KK yang tidak terealisasi karena sudah tidak beralamat di paliyan dan tidak melaporkan pindah alamat, sehingga proses penyaluran bantuan sosial tidak dilaksanakan

NO	SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM SERTA KEUANGAN AKUMULASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						PERMASALAHAN DAN SOLUSI
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	% CAPAIAN (8/6*100)	KEUANGAN (Rp)	% CAPAIAN (10/7*100)	
2	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD		Nilai AKIP PD	83,00	1.426.341.542,02	81,90*	98,675	1.343.672.344,00	94,20	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	1.426.341.542,02	100	100	1.343.672.344,00	94,20	Sisa anggaran disebabkan oleh : 1. gaji ASN yang tidak terserap maksimal karena adanya mutasi pegawai yang tidak sesuai dengan rencana awal. 2. Pembayaran listrik tidak terserap 100 % karena pembayaran sesuai pemakaian, belanja penambahan daya sesuai dengan tagihan dari Biro Teknik Listrik 3. Pengadaan modal tidak terserap 100 % karena harga menyesuaikan dari penyedia 4. Sub kegiatan kepegawaian tidak terserap 100 % karena sisa pembayaran BPJS THL
3	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan		Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	6	58.460.000,00	6	100	58.459.560,00	100,00	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	30.000.000,00	100	100	30.000.000,00	100,00	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	28.460.000,00	100	100	28.459.560,00	100,00	
JUMLAH					100	1.839.579.942,02	100	100	1.751.739.695,00	95,22	

* Capaian AKIP 2024



Paliyan, 31 Januari 2026

ABDUL NUR HIDAYAT, SH., MM
NIP. 197208012005011008

